



**LAPORAN AKTUALISASI
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
BAGI DESA DI KECAMATAN CIGUDEG
TAHUN 2024**

Di Susun Oleh :

**NAMA : Virgiawan Bagaskara, S.Tr.Sos
NIP : 199806262022031006
Jabatan : Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat
Instansi : Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor**

**PELATIHAN DASAR JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT ANGKATAN XII**

PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
SEMINAR HASIL IMPLEMENTASI PENGGERAKAN MASYARAKAT
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
BAGI DESA DI KECAMATAN CIGUDEG

Nama : Virgiawan Bagaskara, S.Tr.Sos
NIP : 1998006262022031006
Jabatan : Ahli Pertama PSM
Unit Kerja/ Instansi : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bogor
Lokasi/ Desa Penggerakan : Kecamatan Cigudeg

Telah di setujui
Bogor, 3 Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing



Eka Prasetya Riauningrum, SP, M.Kesos
NIP. 19861025 200912 2 003

Menyetujui,
Mentor



Imas Masmawati, S.E
NIP. 197607132010012001

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR HASIL IMPLEMENTASI PENGGERAKAN MASYARAKAT
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
BAGI DESA DI KECAMATAN CIGUDEG

Nama : Virgiawan Bagaskara, S.Tr.Sos
NIP : 1998006262022031006
Jabatan : Ahli Pertama PSM
Unit Kerja/ Instansi : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bogor
Lokasi/ Desa Penggerakan : Kecamatan Cigudeg

Telah di setujui
Bogor, 3 Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing



Eka Prasetya Riauningrum, SP, M.Kesos
NIP. 19861025 200912 2 003

Menyetujui,
Mentor



Imas Masmawati, S.E
NIP. 197607132010012001

Penguji

Drs. Priyono, M.Sc
NIP. 19591023 198202 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	2
C. Sasaran Penggerakan	3
D. Output dan Outcome	3
BAB II DESKRIPSI KEBUTUHAN PENGGERAKAN	
A. Profil Lokasi dan Sasaran	4
B. Kondisi Sekarang	5
C. Kondisi Ideal	5
BAB III ANALISIS DAN PRIORITAS KEBUTUHAN	
A. Identifikasi Potensi dan Masalah	6
B. Penentuan Prioritas Penggerakan	7
C. Perumusan Kegiatan Penggerakan	9
BAB IV PENYUSUNAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN	
A. Tahapan Kegiatan	10
B. Jadwal Kegiatan	11
C. Perkiraan Kendala dan Antisipasi	12
BAB V IMPLEMENTASI AKSI PERGERAKAN	
A. Hasil Implementasi Pergerakan	13
B. Reasliasi Pelaksanaan	29
C. Kendala dan Solusi	30
D. Faktor – factor Kunci Keberhasilan	30
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Rencana Tindak Lanjut	31

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai kegiatan dan ruang lingkup untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memiliki tugas sebagaimana ruang lingkup kegiatan meliputi pengembangan komitmen perubahan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan kemasyarakatan. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

Pendampingan berarti untuk membantu kelompok dengan menitik beratkan pada keberadaan dan kemampuan kelompok serta berdasarkan interaksi dari dan oleh untuk anggota kelompok dan atas dasar kesetiakawanan dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya. Pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.

Penanganan tanggap bencana di kecamatan cigudeg masih belum berjalan optimal karena pemerintah desa yang masih belum tanggap dalam merespon bencana di wilayahnya. Penyuluhan mengenai tanggap bencana sudah diberikan oleh BPBD dan pihak kecamatan, disampaikan pula pada rapat minggon di kecamatan. Pelatihan kebencanaan sudah disampaikan dalam bentuk pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari BPBD. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih belum tanggap, seperti pelaporan bencana yang masih belum tanggap, koordinasi dengan stakeholder yang belum maksimal dan jejaring relasi yang belum terbangun secara menyeluruh. Jejaring ini penting karena untuk mengakses berbagai program tanggap bencana yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga masyarakat yang terkena bencana dapat langsung tertangani.

Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan kepada pemerintah desa agar lebih tanggap dalam menangani kejadian bencana di Kecamatan Cigudeg. Selain itu, sebagai PSM diharapkan dapat berperan aktif agar pergerakan melalui pendampingan dapat membantu pemerintah desa dan juga masyarakat dalam penanganan tanggap darurat bencana.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari identifikasi pendampingan ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan pendampingan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya tanggap darurat kebencanaan;
2. Mengetahui kebutuhan pendampingan yang diperlukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka upaya tanggap darurat kebencanaan.

Manfaat dari identifikasi pendampingan ini adalah :

1. Mendapatkan data dan informasi mengenai kebutuhan pendampingan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya tanggap darurat kebencanaan;
2. Membantu pemerintah desa dan Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dalam rangka upaya tanggap darurat kebencanaan.

C. Sasaran Penggerakan

Sasaran penggerakan dalam identifikasi kebutuhan pendampingan adalah pemerintah desa dan Masyarakat. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang paling terdampak apabila terjadi sebuah bencana.

D. Output dan Outcome

Output dari kegiatan identifikasi kebutuhan pendampingan ini adalah terhimpunya data/laporan dan informasi hasil identifikasi kebutuhan pendampingan yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendampingan tanggap darurat bencana.

Untuk menunjang pendidikan, di Kecamatan Cigudeg terdapat 8 Taman kanak-kanak (TK)/Raudhatul ATHfal (RA), 80 Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 27 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk menunjang kesehatan, di Kecamatan Cigudeg tersedia fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik/Balai Pengobatan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Tanpa Rawat Inap, dan Apotek yang tersebar di 15 desa/ kelurahan.

B. Kondisi Sekarang

Kecamatan Cigudeg merupakan kecamatan yang termasuk dalam zona yang rawan bencana di Kabupaten Bogor. Sepanjang tahun 2024 sampai bulan Oktober 2024 tercatat sudah ada 28 orang yang terdampak bencana di Kecamatan Cigudeg. Namun dalam penanganan tanggap darurat pasca bencana masih belum optimal. Masyarakat yang terdampak bencana masih belum memahami apa yang perlu mereka lakukan saat terkena bencana.

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki beberapa program dalam penanganan tanggap darurat pasca bencana melalui beberapa OPD, seperti Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) yang memiliki program Belanja Tidak Terencana (BTT) dalam bentuk rehabilitasi rumah bagi Masyarakat yang terkena bencana. Selain itu Dinas Sosial juga terdapat program bantuan kebencanaan seperti bantuan sandang dan pangan, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan terdapat bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bagi korban bencana berupa bantuan pangan dan juga bantuan uang tunai dari BAZNAS Kabupaten Bogor.

Kondisi saat ini adalah masyarakat yang terkena bencana belum dapat mengakses bantuan-bantuan tersebut secara optimal. Pemerintah Daerah melalui OPD sudah melakukan penyuluhan terkait penanganan pasca bencana dan juga pelatihan penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Bogor dengan target sasaran Pemerintah Desa dengan dibentuknya Desa Tangguh Bencana. Namun pemerintah desa masih memerlukan pendampingan agar lebih tanggap dan responsif saat terjadi bencana

C. Kondisi Ideal

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki beberapa program mengenai penanganan tanggap darurat pasca bencana. Kondisi ideal yang diharapkan

adalah apabila ada masyarakat yang terkena bencana dapat mengakses berbagai program tanggap darurat bencana yang ada. Seperti saat terjadi bencana hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghubungi Pemerintah Desa dan BPBD Kecamatan dan Satpol PP Kecamatan untuk dapat direspon dan ditangani kebencanaannya, kemudian membuat laporan agar dapat ditindaklanjuti ke Tingkat lanjut agar dapat mengakses program tanggap bencana. Maka dari itu diperlukannya pendampingan agar pemerintah desa dapat tanggap dalam merespon bencana sehingga dapat mengakses program-program tanggap bencana untuk membantu mereka dalam hal kuratif dan rehabilitatif pasca bencana.

BAB III DESKRIPSI KEBUTUHAN PENGGERAKAN

A. Identifikasi Potensi dan Masalah

Identifikasi potensi masalah merupakan bagian dari proses penggerakan swadaya masyarakat yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan masalah dan potensi serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable. Berikut merupakan daftar informasi potensi dan masalah yang ditemui oleh penulis.

Tabel 3.1 Daftar Informasi Potensi Dan Masalah

No	Potensi Masalah	Keadaan Sekarang	Keadaan Yang Diinginkan	Masalah
1	Ketanggap daruratan dari pemerintah desa	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat dari pihak pemerintah desa. Apabila terjadi kejadian bencana, desa tidak tanggap dalam menangani bencana seperti tidak langsung membuat laporan tertulis yang ditujukan ke kecamatan.	Pemerintah Desa melalui kaur kesra lebih tanggap dalam penanganan tanggap darurat bencana dengan cara koordinasi dengan stakeholder penanganan bencana (BPBD Kecamatan) lalu membuat laporan terkait bencana yang terjadi.	Pemerintah desa yang belum optimal dalam tanggap darurat kebencanaan.
2	Koordinasi antar stakeholder	Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak terkait, seperti BPBD, Satpol PP Kecamatan, dan dinas kesehatan dalam situasi darurat.	Terjalannya koordinasi yang baik antar stakeholder melalui pertemuan berkala dan pembentukan jaringan komunikasi khusus untuk keadaan darurat.	Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait dalam penanganan bencana.
3	Belum optimalnya	Saat terjadi bencana, pemerintah desa	Pemerintah Desa membangun jejaring dengan	Jejaring dan Kemitraan yang belum optimal

	Jejaring dan Kemitraan	kurang memiliki akses terhadap program-program tanggap bencana yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor	Kecamatan sebagai fasilitator terhadap OPD yang memiliki program tanggap bencana	dengan OPD yang memiliki program penanganan tanggap bencana.
--	------------------------	---	--	--

Dalam tabel tersebut terdapat identifikasi potensi dan masalah yang harus segera diselesaikan.

B. Penentuan Prioritas Penggerakan

Dalam penentuan prioritas penggerakan, peserta menggunakan metode USG. Adapun kriteria penetapan indikator USG, yang dibuat dengan memperhatikan tiga faktor, yaitu:

1. Urgency (U), yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi;
2. Seriousness (S), yaitu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan;
3. Growth (G), yaitu Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Tabel 3.2 Deskripsi Kriteria URGENCY

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Sangat memerlukan penanganan segera, penting untuk dicarikan solusi dalam waktu secepatnya
4	Mendesak	Memerlukan penanganan segera dan penting untuk dicarikan solusi pemecahan
3	Cukup Mendesak	Memerlukan penanganan segera, namun dapat teratasidengan berjalannya waktu dalam penyelesaian masalah
2	Kurang Mendesak	Kurang memerlukan penanganan segera, waktu penyelesaian dapat ditunda

1	Tidak Mendesak	Tidak memerlukan penanganan segera
---	----------------	------------------------------------

Tabel 3.3 Deskripsi Kriteria SERIOUSNESS

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Serius	Akibat yang ditimbulkan sangat serius, jika ditunda maka berakibat fatal dan mengancam kesehatan masyarakat luas
4	Serius	Akibat yang ditimbulkan serius dan mengancam kesehatan masyarakat
3	Cukup Serius	Akibat yang ditimbulkan cukup serius, namun dapat dikendalikan dampak dan akibatnya
2	Kurang Serius	Akibat yang ditimbulkan kurang serius dan potensi dampak dan akibat rendah
1	Tidak Serius	Akibat yang ditimbulkan tidak serius dan tidak berpengaruh apapun

Tabel 3.4 Deskripsi Kriteria GROWTH

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Cepat Memburuk	Masalah sangat berkembang dan dampak sangat sulit untuk dicegah
4	Cepat Memburuk	Masalah sedang berkembang dan dampak sulit untuk dicegah
3	Cukup Cepat Memburuk	Masalah cukup berkembang dan potensi dampak rendah dan dapat diminimalisir
2	Kurang Cepat Memburuk	Masalah kurang berkembang dan tidak menimbulkan dampak lain
1	Tidak Cepat Memburuk	Masalah tidak berkembang dan tidak menimbulkan dampak lain

Berdasarkan Analisis USG tersebut, terdapat penyebab masalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Matrik dan Analisis Masalah

No	Penyebab Masalah	Faktor			Jumlah	Prioritas
		U	S	G		
1	Pemerintah desa yang belum optimal dalam tanggap darurat kebencanaan.	5	5	5	15	I
2	Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait dalam penanganan bencana.	5	3	5	13	III
3	Jejaring dan Kemitraan yang belum optimal dengan OPD yang memiliki program penanganan tanggap bencana.	5	5	4	14	II

Berdasarkan analisis masalah dengan teknik USG tersebut, maka diperoleh kesimpulan yang mengarah pada **Pemerintah desa yang belum optimal dalam tanggap darurat kebencanaan.**

C. Perumusan Kegiatan Penggerakan

Perumusan kegiatan peserta dapat dilihat menggunakan identifikasi alternatif kegiatan pemecahan masalah seperti tabel di bawah ini:

No	Prioritas Masalah Yang Akan Dipecahkan	Alternatif Kegiatan Pemecahan Masalah
1.	Pemerintah desa yang belum optimal dalam tanggap darurat kebencanaan.	Identifikasi kebutuhan pendampingan pemerintah desa mengenai tanggap darurat kebencanaan.

Dari prioritas masalah yang akan dipecahkan maka munculah alternatif kegiatan pemecahan masalah dengan cara mengidentifikasi kebutuhan.

BAB IV
PENYUSUNAN LANGKAH-LANGKAH PENGGERAKAN

A. Tahapan Kegiatan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Stakeholder/ Pemangku Kepentingan	Peran
1	Persiapan	Konsultasi dengan mentor	Arahan dan Masukan terkait Identifikasi Kebutuhan Penggerakan Pendampingan	Peserta dan Mentor	Pemberi arahan dan masukan
		Melakukan telaan studi dan regulasi mengenai penanganan tanggap bencana	Dokumen dan Peraturan mengenai penanganan tanggap bencana	Peserta	Penyedia bahan identifikasi pendampingan
		Menentukan metode identifikasi pendampingan	Terpilihnya metode wawancara	Peserta dan Mentor	Penentu metode pendampingan
		Menyusun pedoman wawancara	Pertanyaan wawancara	Peserta	Pewawancara
2	Pelaksanaan	Menentukan informan wawancara	Daftar informan	1. Aparatur Desa 2. BPBD Kecamatan 3. TKSK	Informan/ pemberi informasi
		Wawancara kepada informan	Transkrip hasil wawancara	1. Aparatur Desa 2. BPBD Kecamatan 3. TKSK	Informan/ Pemberi informasi
		Mengolah Data dan Informasi Hasil Wawancara	Data dan Informasi Hasil Wawancara	Peserta	Pengolah data
3	Pengendalian	Mengecek Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan	Data dan Informasi Kebutuhan Pendampingan	Peserta dan Mentor	Pengecek Hasil Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan

		Melakukan Mentoring dan Evaluasi Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan	Catatan Hasil Mentoring dan Evaluasi	Mentor	Mentor
4	Pelaporan	Menyusun Laporan Kegiatan	Laporan Aktualisasi Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan	Peserta	Pembuat Laporan

B. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Minggu)				Lokasi Pelaksanaan
		I	II	III	IV	
1	Persiapan					
	Konsultasi dengan mentor					Kantor Kecamatan
	Melakukan telaan studi dan regulasi mengenai penanganan tanggap bencana					Kantor Kecamatan
	Menentukan metode identifikasi pendampingan					Kantor Kecamatan
	Menyusun pedoman wawancara					Kantor Kecamatan
2	Pelaksanaan					
	Menentukan informan wawancara					Kantor Desa dan Kantor Kecamatan
	Wawancara kepada informan					Kantor Desa dan Kantor Kecamatan

	Mengolah Data dan Informasi Hasil Wawancara					Kantor Kecamatan
3	Pengendalian					
	Mengecek Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan					Kantor Kecamatan
	Melakukan Mentoring dan Evaluasi Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan					Kantor Kecamatan
4	Pelaporan					
	Menyusun Laporan Kegiatan					Kantor Kecamatan


C. Perkiraan Kendala dan Antisipasi

No.	Kendala	Antisipasi
1	Sulit menentukan instrument wawancara mengenai tanggap darurat kebencanaan	Diskusi dengan mentor, studi literatur mengenai tanggap darurat kebencanaan
2	Informan yang sulit ditemui dan koordinasi	Membuat jadwal dan janji untuk bertemu dengan informan
3	Sulit mengevaluasi hasil wawancara	Membuat catatan hasil wawancara

BAB V
IMPLEMENTASI AKSI PENGGERAKAN

A. Hasil Implementasi Penggerakan

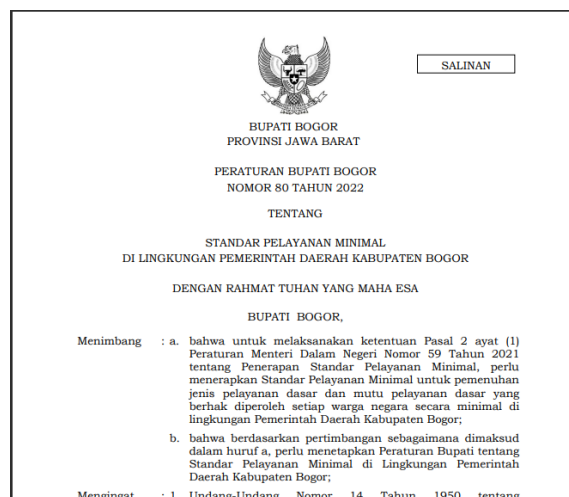
Implementasi penggerakan masyarakat merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan tujuan supaya para peserta dapat menerapkan pengetahuan selama pelatihan dalam proses penggerakan masyarakat. Penggerakan masyarakat yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Tanggap Darurat Bencana Bagi Desa Di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Lokasi yang menjadi fokus identifikasi adalah desa di Kecamatan Cigudeg, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh penulis disajikan dalam matriks berikut :

1	Kegiatan Persiapan
<p><u>Tahapan Kegiatan :</u></p> <p>1. Konsultasi dengan Mentor</p> <p>Penulis melakukan koordinasi dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cigudeg. Penulis melakukan koordinasi terkait permasalahan yang diangkat yaitu Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Tanggap Darurat Bencana Bagi Desa di Kecamatan Cigudeg, target dan sasaran penggerakan masyarakat dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan koordinasi dilakukan pada tanggal 6 November 2024 bertempat di ruangan pemberdayaan masyarakat.</p> <p><u>Output:</u></p> <p>a. Foto Konsultasi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>b. Rekomendasi mentor sebagaimana terlampir dalam <i>form</i> bimbingan mentor.</p> <p><u>Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Perannya:</u></p> <p>a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cigudeg selaku mentor dalam pelaksanaan penggerakan masyarakat di Kecamatan Cigudeg memberikan arahan kepada penulis.</p>	
<p><u>Tahapan Kegiatan :</u></p> <p>2. Melakukan telaahan studi dan regulasi mengenai penanganan tanggap bencana</p>	

Studi tentang penanganan tanggap bencana berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. penulis melakukan studi literatur mengenai isu yang diangkat yaitu tanggap bencana dari berbagai sumber. Hal tersebut dilakukan supaya pertanyaan yang diajukan menggambarkan isu permasalahan dengan tepat. Studi literatur disusun pada tanggal 13 November 2024

Output :

a. Foto pada saat studi literatur



Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal



Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana



Buku Saku Kecamatan Tangguh Bencana

Stakeholder/Pemangku Kepentingan

-

Tahapan Kegiatan :

3. Menyusun Rancangan Pertanyaan

Penulis menyusun rancangan pertanyaan pada tanggal 13 - 14 November 2024. Pertanyaan disusun berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, daftar pertanyaan disusun dalam bentuk pedoman wawancara. Hasil penyusunan ini kemudian dikonsultasikan dengan mentor untuk mendapatkan arahan dan saran.

Output:

- a. Pedoman wawancara yang tercantum dalam lampiran.
- b. Form Konsultasi dengan mentor

I. Identitas Responden
1. Nama:
2. Jabatan/Peran dalam tanggap darurat:
3. Lembaga/Organisasi (jika ada):
II. Pertanyaan Utama
A. Kesiapsiagaan Sebelum Bencana
1. Apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana?
2. Apakah ada pelatihan atau simulasi tanggap darurat sebelum bencana terjadi? Jika ya, bagaimana efektivitasnya?
3. Apa hambatan utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?
B. Respon Awal Saat Bencana Terjadi
1. Bagaimana Anda atau organisasi Anda mengetahui informasi awal tentang bencana?
2. Seberapa cepat informasi mengenai bencana sampai ke pihak terkait dan masyarakat?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya evakuasi awal?
C. Sistem Komunikasi dan Koordinasi
1. Bagaimana sistem komunikasi berfungsi selama tanggap darurat?
2. Apakah ada kendala dalam koordinasi antar lembaga atau tim relawan? Jika ya, apa penyebabnya?
3. Bagaimana informasi penting disampaikan kepada masyarakat terdampak?

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Mentor memberikan arahan dan saran untuk kelengkapan daftar pertanyaan yang disusun.

Tahapan Kegiatan:

1. Berkoordinasi dengan pihak *stakeholder* untuk membuat jadwal pertemuan Kegiatan pelaksanaan penggerakan di Kecamatan Cigudeg diawali dengan melakukan koordinasi kepada sasaran dan *stakeholder* yang terlibat. Penyusunan jadwal pelaksanaan dilakukan pada tanggal 15 November 2024, koordinasi awal dilakukan untuk menentukan jadwal untuk pertemuan. Hal ini untuk mengantisipasi jadwal pertemuan yang saling berbenturan atau tidak sesuai. Identifikasi kebutuhan yang dilakukan dalam tanggap darurat bencana melibatkan beberapa pihak, sehingga perlu untuk membuat jadwal dalam pengumpulan data.

Output:

- a. Jadwal pertemuan untuk melakukan wawancara dengan stakeholder

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. BPBD Kecamatan
- b. Pemerintah Desa, terutama kaur kesejahteraan rakyat yang mengurus urusan kebencanaan di wilayah desa.
- c. Satpol PP Kecamatan.
- d. TKSK
- e. Babinsa
- f. PSM

Tahapan Kegiatan:

2. Melakukan wawancara
Pengumpulan data untuk penggerakan masyarakat dilakukan penulis dengan beberapa metode yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa *stakeholder* yang berkaitan dengan penanganan bencana yaitu dari unsur Pemerintah Desa, BPBD, Koramil/Babinsa, Satpol PP, dan PSM. Observasi juga dilakukan oleh penulis dalam kegiatan tanggap darurat bencana.
Proses pengumpulan data dilakukan dari tanggal 18 – 22 November 2024 Wawancara dilakukan dalam beberapa tahapan menyesuaikan waktu dan kesediaan dari objek identifikasi untuk diwawancarai.

Output:

a. Dokumentasi kegiatan



Wawancara dengan BPBD Kecamatan



Wawancara dengan unsur Koramil/Babinsa dan Satpol PP



Pertemuan/Wawancara dengan para kaur kesra desa



Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat



Wawancara dengan TKSK Kecamatan Cigudeg

b. Notulensi

Setiap kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dengan *stakeholder* penulis menuliskan hasilnya dalam notulensi yang kemudian dilampirkan dalam bentuk verbatim.

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. BPBD Kecamatan, TKSK, Babinsa dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai informan memberikan informasi mengenai penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana yang sudah dilakukan di Kecamatan Cigudeg. Pelayanan kebencanaan apa yang sudah mereka berikan.
- b. Pemerintah desa dalam hal ini kaur kesra desa memberikan informasi mengenai alur penanganan bencana dalam aspek kewilayahan, mulai dari penanganan tanggap darurat bencana, pelaporan, hingga rehabilitasi pasca bencana.

Tahapan Kegiatan :

3. Melakukan pencarian dokumen pendukung

Setelah melakukan wawancara dan observasi, kemudian penulis melakukan pencarian data pendukung untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai informasi yang didapatkan. Studi literatur dilakukan dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pengumpulan data.

Output:

- a. Data kejadian bencana
- b. Data distribusi bantuan bencana

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Unsur Kecamatan

Tahapan Kegiatan :

4. Analisis dan Pengolahan Data

Data dari hasil pengumpulan data baik dengan metode wawancara dan studi literatur yang terkumpul kemudian direkap untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menganalisis data.

Output :

- a. Hasil Wawancara yang disajikan dalam bentuk terlampir dalam verbatim yang terlampir di dalam lampiran.

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Rekan BPBD Kecamatan untuk berdiskusi mengenai analisis dan pengolahan data

Tahapan Kegiatan :

5. Pendampingan distribusi bantuan bagi korban bencana

Pada tanggal 21 November 2024 telah terjadi bencana longsor di Desa Mekarjaya Kp. Dukuh yang menimpa 1 unit rumah. Pendampingan yang dilakukan adalah dengan melaporkan ke instansi terkait, kemudian pengambilan logistik bantuan bencana di Dinas Sosial dan menyalurkannya kepada korban terdampak bencana.

Output :



Kejadian bencana



Pengambilan logistic bantuan



Penyaluran bantuan dan monitoring pasca bencana

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Unsur desa dalam hal ini adalah kaur kesra
- b. BPBD Kecamatan
- c. Satpol PP

3 Kegiatan Pengendalian

Tahapan Kegiatan :

1. Analisis hasil identifikasi Kebutuhan Pendampingan

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi data yang telah dilakukan, selanjutnya penulis menyusun daftar identifikasi alternatif pemecahan masalah pada tanggal 25 – 26 November 2024

Output : Rekomendasi Penyelesaian Masalah



Diskusi dengan TKSK Kecamatan

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Rekan Kerja TKSK yang memberikan saran dalam penyusunan identifikasi kebutuhan pendampingan yang diperlukan berdasarkan pengumpulan data

Tahapan Kegiatan :

2. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor

Konsultasi dan evaluasi dilakukan setelah penulis selesai melaksanakan serangkaian kegiatan pengumpulan data. Konsultasi dan evaluasi bersama mentor dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024, sedangkan konsultasi dengan *coach* dilakukan secara virtual melalui zoom meeting pada hari senin tanggal 2 Desember 2024. Mentor dan *coach* memberikan masukan dan arahan terkait

sistematika laporan implementasi pergerakan sebagaimana terangkum dalam form bimbingan coach dan mentor

Output :

- a. Masukan dan rekomendasi dari mentor dan *coach* sebagaimana terlampir dalam form bimbingan mentor dan *coach*.
- b. Dokumentasi foto kegiatan bimbingan.

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:

- a. Kasi PM sebagai mentor di memberikan masukan dan arahan untuk proses pembuatan laporan implementasi
- b. Ibu Eka sebagai *coach* yang memberikan arahan terkait sistematika penulisan laporan implementasi pergerakan.

Bencana alam dan non-alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, memberikan dampak yang luas bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai kecamatan yang terletak di daerah rawan bencana, Kecamatan Cigudeg kerap menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, kebakaran dan angin kencang. Penanggulangan bencana yang efektif sangat bergantung pada kesiapan dalam menghadapi tanggap darurat. Tanggap darurat bencana mencakup serangkaian kegiatan yang dilaksanakan segera setelah bencana terjadi, dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, serta meminimalkan kerusakan yang lebih lanjut.

Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut adanya perbaikan dalam sistem tanggap darurat bencana. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperbaiki sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran masyarakat dalam penanggulangan bencana sangatlah penting. Dengan langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi, diharapkan penanganan tanggap darurat bencana dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan efisien, serta dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Identifikasi kebutuhan pendampingan tanggap darurat bencana merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana. Proses ini membantu menentukan sumber daya yang diperlukan, serta jenis pendampingan yang paling relevan bagi korban bencana. Berikut adalah beberapa hasil identifikasi kebutuhan pendampingan tanggap darurat bencana:

1. Kebutuhan Informasi dan Komunikasi

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang jenis bencana yang terjadi, tindakan yang harus dilakukan, dan tempat evakuasi, maka dari itu dibutuhkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui media sosial, radio, atau pengumuman langsung.

Kebutuhan akan sistem komunikasi yang dapat menyampaikan informasi kepada pihak berwenang dan masyarakat sangat penting. Pendampingan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan update bencana secara real-time.

kebutuhan informasi dan komunikasi dalam tanggap darurat bencana menekankan pentingnya penyampaian informasi yang edukatif dan praktis kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan dan respons bencana. Informasi yang dibutuhkan mencakup pemahaman mengenai potensi risiko di wilayah tertentu, cara evakuasi yang aman, teknik pertolongan pertama, dan pentingnya koordinas

2. Kebutuhan Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Hasil identifikasi kebutuhan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana menunjukkan bahwa penyediaan barang dan layanan esensial menjadi prioritas utama. Kebutuhan dasar meliputi makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta tempat penampungan sementara yang aman. Selain itu, perlengkapan kebersihan seperti sabun, masker, dan sanitasi darurat sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Dalam hal logistik, dibutuhkan sistem distribusi yang cepat, terorganisir, dan dapat menjangkau wilayah terdampak, terutama area terpencil atau sulit diakses. Koordinasi antarinstansi, relawan, dan masyarakat lokal juga penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap kelompok terdampak, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan logistik dan pemantauan persediaan secara real-time dapat membantu memastikan efisiensi dalam distribusi bantuan.

Pendampingan dalam distribusi barang-barang kebutuhan pokok (makanan, air bersih, pakaian, perlengkapan tidur, dan obat-obatan) sangat penting. Ini mencakup pengaturan jalur distribusi agar bantuan sampai ke lokasi yang terdampak bencana dengan efisien. Selain itu juga mengidentifikasi sistem sumber yang memiliki akses untuk bantuan kebencanaan.

3. Kebutuhan Penanganan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas Relawan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang cukup

untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti melakukan pertolongan pertama, distribusi bantuan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, koordinasi Antarlembaga dan Sumber Daya Manusia juga membutuhkan pendampingan, mencakup koordinasi antara berbagai lembaga (pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta) untuk memastikan respons bencana berjalan secara terintegrasi dan efektif.

4. Kebutuhan Manajemen dan Koordinasi Tanggap Darurat

Pendampingan dalam hal koordinasi sangat penting, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Pendampingan ini mencakup fasilitasi pertemuan antara stakeholder, baik pemerintah, organisasi kemanusiaan, maupun masyarakat. Lalu, pendampingan dalam pengumpulan, analisis, dan distribusi data bencana sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Hal ini termasuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pemetaan bencana atau sistem manajemen informasi geografis (GIS).

5. Kebutuhan Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana

Untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan, penting adanya pendampingan dalam merancang dan mengimplementasikan program mitigasi bencana. Ini bisa meliputi penyuluhan tentang cara-cara meminimalisir risiko bencana seperti pembangunan rumah yang tahan gempa, pembuatan tanggul banjir, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa rekomendasi alternatif yang dapat dilakukan untuk tanggap darurat bencana. Rekomendasi alternatif diuraikan dalam Tabel berikut :

No.	Alternatif Penyelesaian	Stakeholder/ Para Pihak Terkait	Hasil yang Diharapkan
1	Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana.	-	1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang langkah-langkah mitigasi dan pencegahan bencana yang dapat dilakukan

			<p>secara individu dan komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman tentang pentingnya kewaspadaan dini dan peran masyarakat dalam meminimalkan dampak bencana. <p>2. Tanggap Darurat yang Cepat dan Efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat merespons bencana dengan cepat dan tepat, serta menyelamatkan diri dan orang lain dengan efektif.
2	Pendampingan dalam distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan Koordinasi Tanggap Darurat	-	<p>1. Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang Tepat Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang kebutuhan pokok (seperti makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, dan selimut) dapat diterima oleh seluruh korban bencana sesuai dengan

			<p>kebutuhan mereka, tanpa ada yang tertinggal atau tidak terjangkau.</p> <p>2. Koordinasi yang Lebih Efektif</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan relawan, dapat bekerja sama dengan lebih baik dan terkoordinasi, mengurangi duplikasi upaya dan memastikan bantuan yang diterima oleh korban lebih terstruktur. <p>3. Kesinergian antar Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi yang baik antar lembaga terkait memastikan adanya kesepakatan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam distribusi barang serta dalam
--	--	--	--

			<p>penanganan logistik.</p> <p>4. Mengurangi Kepanikan dan Kebingungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan pendampingan yang efektif, masyarakat tidak akan bingung dalam mengakses bantuan yang diberikan, karena ada arahan yang jelas tentang cara, waktu, dan tempat distribusi.
3	Pelatihan tanggap darurat bencana bagi relawan dan masyarakat	-	<p>1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kecepatan Tanggap</p> <p>2. Keterampilan dalam Pertolongan Pertama dan Penanganan Korban</p>

Terdapat beberapa rekomendasi alternatif yang dapat dilakukan berkaitan dengan hasil identifikasi kebutuhan pendampingan tanggap darurat bencana di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yaitu:

1. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, sesuai dengan fokus kebutuhan masyarakat yaitu penyuluhan serta berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai tanggap darurat bencana berada di kategori cukup, yang jika dibandingkan dengan kategori baik cukup jauh frekuensinya sehingga dibutuhkan penyuluhan yang membahas mengenai tanggap darurat bencana. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana. Melalui berbagai kegiatan seperti simulasi, dan

kampanye informasi, masyarakat diajarkan tentang langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Mereka diberi pemahaman mengenai jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya, cara-cara mitigasi risiko, serta prosedur evakuasi yang aman. Selain itu, edukasi ini juga mengajarkan keterampilan dasar pertolongan pertama dan pengelolaan sumber daya dalam situasi darurat. Dengan adanya penyuluhan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat merespons bencana dengan cepat, terkoordinasi, dan dengan rasa tenang, sehingga dapat mengurangi dampak negatif bencana dan mempercepat proses pemulihan. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan individu, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2. Pendampingan dalam distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan Koordinasi lintas sektor tanggap darurat

Alternatif lain dari identifikasi kebutuhan pendampingan dalam tanggap darurat bencana adalah dengan melakukan pendampingan dalam distribusi barang-barang bantuan kebutuhan pokok dan koordinasi lintas sektor tanggap darurat bencana.

Pendampingan dalam distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan koordinasi lintas sektor tanggap darurat sangat penting untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan cepat, tepat, dan merata. Dalam proses pendampingan, relawan dan pihak terkait lainnya bekerja untuk memantau dan mengarahkan distribusi bantuan, seperti makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan darurat, sehingga tidak ada wilayah atau kelompok yang tertinggal. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi relawan, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan setiap elemen berfungsi secara sinergis. Koordinasi yang baik menghindari duplikasi bantuan, memastikan efisiensi sumber daya, serta mempercepat penanganan bencana. Dengan adanya pendampingan yang efektif dan komunikasi yang lancar antar sektor, proses distribusi dapat berjalan lebih terorganisir, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pemulihan bagi korban bencana.

3. Pelatihan tanggap darurat bencana bagi relawan dan masyarakat

Pelatihan tanggap darurat bencana bagi relawan dan masyarakat merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang berbagai jenis bencana, langkah-langkah penyelamatan, serta teknik pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, pelatihan ini juga melibatkan simulasi lapangan untuk mempraktikkan respons cepat dan koordinasi dalam kondisi darurat. Dengan adanya

pelatihan ini, relawan dan masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih tanggap, terampil, dan berkontribusi secara efektif dalam upaya penyelamatan serta pengurangan risiko bencana di wilayahnya.

B. Realisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan aksi pergerakan di Kecamatan Cigudeg tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan. Kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam rancangan aksi kegiatan mengalami beberapa penyesuaian dengan jadwal para stakeholder serta kegiatan yang dilaksanakan di kantor. Sebagai seorang PSM perlu memiliki kemampuan adaptif untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tahapan kegiatan yang telah disusun sebelumnya memiliki beberapa penyesuaian untuk penyempurnaan hasil identifikasi yang dilakukan. Realisasi pelaksanaan kegiatan dilampirkan dalam tabel berikut :

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Persiapan	Konsultasi dengan mentor	6 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Melakukan telaan studi dan regulasi mengenai penanganan tanggap bencana	13 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Menyusun pedoman wawancara	13 – 14 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
2	Pelaksanaan	Menentukan informan wawancara	15 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Wawancara kepada informan	18 – 22 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Melakukan Pencarian data pendukung	22 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	Tambahan kegiatan sesuai dengan arahan mentor
		Analisis dan pengolahan data	23 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Pendampingan distribusi bantuan bagi korban bencana	21 – 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Desa Mekarjaya 	Melakukan pendampingan karena ada kejadian bencana di Desa Mekarjaya

3	Pengendalian	Analisis hasil identifikasi Kebutuhan Pendampingan	25 – 26 November 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
		Melakukan Mentoring dan Evaluasi Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan	29 November & 2 Desember 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	
4	Pelaporan	Menyusun Laporan Kegiatan	25 November – 2 Desember 2024	Kantor Kecamatan Cigudeg	

C. Kendala dan Solusi

Perencanaan sebelum melakukan kegiatan aksi pergerakan merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dilakukan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mengidentifikasi kemungkinan faktor penghambat dengan mempersiapkan solusi untuk penanganannya. Terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh penulis dalam pelaksanaan aksi pergerakan yang disajikan dalam tabel 5.4 beserta solusi yang dilakukan.

No.	Kendala	Solusi
1	Jadwal stakeholder yang bersamaan	Menyesuaikan jadwal untuk dapat mengakomodir pelaksanaan pengumpulan data.
2	Bahan untuk membuat pedoman wawancara yang cukup banyak	Menganalisis kembali data-data yang diperlukan
3	Analisis hasil pengumpulan data	Berkonsultasi dengan mentor dan para stakeholder

D. Faktor – factor Kunci Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan aksi pergerakan masyarakat tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Terdapat faktor-faktor kunci dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Dukungan dari camat dan mentor sehingga fasilitasi untuk pengumpulan data dapat berjalan dengan baik
2. Para Stakeholder yang bersedia untuk diwawancara bahkan antusias dalam memberikan data.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, terutama banjir dan longsor, yang disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya infrastruktur tanggap darurat, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan sistem komunikasi. Hasil identifikasi kebutuhan mengungkapkan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memperkuat upaya tanggap darurat di wilayah ini. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan rutin bagi masyarakat dan kelompok siaga bencana desa (Satgas), untuk membangun pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tenda evakuasi, alat komunikasi, dan perlengkapan penyelamatan, menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung respons cepat terhadap bencana. Ketiga, pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat menerima informasi peringatan dini secara efektif dan mempercepat koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, perlunya sosialisasi dan simulasi secara berkala menjadi salah satu rekomendasi utama agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai skenario bencana. Upaya pendampingan tanggap darurat ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat, sehingga tercipta sistem tanggap darurat yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dampak bencana yang kerap terjadi di Kecamatan Cigudeg dapat diminimalkan, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dapat ditingkatkan secara signifikan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pendampingan Tanggap Darurat Bencana Bagi Desa Di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, maka rencana tindak lanjut dari kegiatan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Stakeholder/ Para Pihak Terlibat
1	Merekomendasikan dan berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> untuk hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Desa• BPBD• TKSK• Koramil

2	Melaporkan dan merekomendasikan hasil identifikasi kepada atasan untuk dapat di tindak lanjuti menjadi kegiatan	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Cigudeg
3	Mendorong hasil identifikasi kepada setiap desa untuk diajukan kedalam APDes 2025	Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa
4	Bersinergi dengan pihak BPBD dalam fasilitasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan tanggap darurat bencana	Periode 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • Pemerintah Kecamatan • BPBD

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Theophilus Yanuarto, dkk. (2019). Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, Jakarta : Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Dr. Safrizal ZA, M.Si, dkk. (2023) Buku Saku KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana). Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

Identitas Responden

1. Nama:
2. Jabatan/Peran dalam tanggap darurat:
3. Lembaga/Organisasi (jika ada):
4. Lokasi saat bencana terjadi:

II. Pertanyaan Utama

A. Kesiapsiagaan Sebelum Bencana

1. Apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana?
2. Apakah ada pelatihan atau simulasi tanggap darurat sebelum bencana terjadi? Jika ya, bagaimana efektivitasnya?
3. Apa hambatan utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?

B. Respon Awal Saat Bencana Terjadi

1. Bagaimana Anda atau organisasi Anda mengetahui informasi awal tentang bencana?
2. Seberapa cepat informasi mengenai bencana sampai ke pihak terkait dan masyarakat?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya evakuasi awal?

C. Sistem Komunikasi dan Koordinasi

1. Bagaimana sistem komunikasi berfungsi selama tanggap darurat?
2. Apakah ada kendala dalam koordinasi antarlembaga atau tim relawan? Jika ya, apa penyebabnya?
3. Bagaimana informasi penting disampaikan kepada masyarakat terdampak?

D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Apa saja kebutuhan dasar yang sulit dipenuhi selama tanggap darurat?
2. Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak?
3. Apakah ada kelompok tertentu yang sulit dijangkau? Jika ya, apa alasannya?

E. Logistik dan Sumber Daya

1. Bagaimana pengelolaan logistik dilakukan selama tanggap darurat?
2. Apakah ada keterbatasan sumber daya (personel, peralatan, atau dana)? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik?

F. Dukungan Psikososial

1. Apakah dukungan psikososial diberikan kepada masyarakat terdampak?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan tersebut?
3. Apa kendala dalam memberikan dukungan psikososial?

III. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Anda, apa yang dapat diperbaiki dalam sistem tanggap darurat bencana?
2. Apa rekomendasi Anda untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan?

Hasil Wawancara I

I. Informan:

Nama : Juweni
Jabatan : BPBD Kecamatan
Lembaga : BPBD
Tanggal Wawancara : 18 November 2024

II. Pertanyaan Utama

A. Kesiapsiagaan Sebelum Bencana

- 1. Apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana?**
Kami melakukan sosialisasi rutin tentang potensi bencana di wilayah ini, terutama banjir dan longsor. Selain itu, kami membentuk tim siaga bencana di tingkat desa.
- 2. Apakah ada pelatihan atau simulasi tanggap darurat sebelum bencana terjadi? Jika ya, bagaimana efektivitasnya?**
Ya, kami pernah mengadakan simulasi tanggap darurat sebanyak dua kali dalam setahun. Simulasi ini cukup membantu, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang optimal.
- 3. Apa hambatan utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?**
Hambatan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan keterbatasan dana untuk pelatihan lebih lanjut.

B. Respon Awal Saat Bencana Terjadi

- 1. Bagaimana Anda atau organisasi Anda mengetahui informasi awal tentang bencana?**
Kami menerima informasi dari laporan warga dan sistem peringatan dini yang dipasang di beberapa titik rawan.
- 2. Seberapa cepat informasi mengenai bencana sampai ke pihak terkait dan masyarakat?**
Informasi biasanya sampai dalam waktu 1-2 jam setelah kejadian awal, tetapi distribusi informasi ke masyarakat sering terhambat oleh kendala sinyal.
- 3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya evakuasi awal?**
Kendala utama adalah akses jalan yang terputus akibat longsor, serta kurangnya kendaraan evakuasi.

C. Sistem Komunikasi dan Koordinasi

- 1. Bagaimana sistem komunikasi berfungsi selama tanggap darurat?**
Sistem komunikasi sering terhambat oleh gangguan jaringan, tetapi kami menggunakan radio HT sebagai alternatif.
- 2. Apakah ada kendala dalam koordinasi antarlembaga atau tim relawan? Jika ya, apa penyebabnya?**
Ya, terkadang ada miskomunikasi antarlembaga karena kurangnya data yang terintegrasi.
- 3. Bagaimana informasi penting disampaikan kepada masyarakat terdampak?**
Informasi biasanya disampaikan melalui pengeras suara di posko, tetapi tidak semua warga dapat menjangkau posko.

D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. **Apa saja kebutuhan dasar yang sulit dipenuhi selama tanggap darurat?**
Air bersih, makanan, dan perlengkapan bayi adalah kebutuhan yang sering sulit terpenuhi.
2. **Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak?**
Distribusi dilakukan melalui posko utama, tetapi ada hambatan di wilayah yang sulit dijangkau.
3. **Apakah ada kelompok tertentu yang sulit dijangkau? Jika ya, apa alasannya?**
Ya, kelompok di desa terpencil sulit dijangkau karena jalan rusak atau tertutup longsor.

E. Logistik dan Sumber Daya

1. **Bagaimana pengelolaan logistik dilakukan selama tanggap darurat?**
Logistik dikelola oleh tim gabungan, tetapi koordinasi distribusinya masih perlu ditingkatkan.
2. **Apakah ada keterbatasan sumber daya (personel, peralatan, atau dana)? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?**
Ya, keterbatasan terutama pada alat berat dan personel terlatih. Kami mengatasinya dengan meminta bantuan dari lembaga lain.
3. **Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik?**
Membangun gudang logistik yang dekat dengan daerah rawan dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.

F. Dukungan Psikososial

1. **Apakah dukungan psikososial diberikan kepada masyarakat terdampak?**
Ya, kami bekerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan trauma healing bagi anak-anak dan orang dewasa.
2. **Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan tersebut?**
Sebagian besar masyarakat menyambut baik, tetapi ada yang masih enggan mengikuti karena trauma yang mendalam.
3. **Apa kendala dalam memberikan dukungan psikososial?**
Kurangnya tenaga profesional dan waktu yang terbatas menjadi kendala utama.

III. Pertanyaan Penutup

1. **Menurut Anda, apa yang dapat diperbaiki dalam sistem tanggap darurat bencana?**
Sistem peringatan dini perlu ditingkatkan, begitu juga dengan koordinasi antar lembaga yang masih kurang terintegrasi.
2. **Apa rekomendasi Anda untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan?**
Rekomendasi kami adalah meningkatkan edukasi masyarakat, membangun infrastruktur tanggap bencana yang lebih baik, dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mitigasi risiko.

Hasil Wawancara II

I. Informan:

Nama : Hendrik dan Anton
Jabatan : Babinsa dan Satpol PP
Kesatuan : Koramil dan Satpol PP
Tanggal Wawancara : 20 November 2024

II. Pertanyaan Utama

A. Kesiapsiagaan Sebelum Bencana

- 1. Apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana?**
Kami membantu dalam pelatihan simulasi evakuasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Selain itu, kami juga mendukung penyediaan logistik untuk kesiapsiagaan.
- 2. Apakah ada pelatihan atau simulasi tanggap darurat sebelum bencana terjadi? Jika ya, bagaimana efektivitasnya?**
Ya, pelatihan dan simulasi dilakukan bekerja sama dengan BPBD dan masyarakat. Efektivitasnya cukup baik, tetapi tingkat partisipasi masyarakat sering kali belum maksimal.
- 3. Apa hambatan utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?**
Kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak yang merasa bencana adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah sehingga mereka kurang proaktif dalam mengikuti pelatihan.

B. Respon Awal Saat Bencana Terjadi

- 1. Bagaimana Anda atau organisasi Anda mengetahui informasi awal tentang bencana?**
Informasi awal biasanya kami dapatkan dari laporan warga, pantauan tim di lapangan, atau informasi resmi dari BPBD.
- 2. Seberapa cepat informasi mengenai bencana sampai ke pihak terkait dan masyarakat?**
Cukup cepat, tetapi distribusi informasi ke masyarakat di lokasi terpencil sering terlambat karena akses komunikasi yang sulit.
- 3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya evakuasi awal?**
Kendala utama adalah akses jalan yang terputus, jumlah personel terbatas, dan kurangnya alat berat untuk membuka jalur evakuasi.

C. Sistem Komunikasi dan Koordinasi

- 1. Bagaimana sistem komunikasi berfungsi selama tanggap darurat?**
Sistem komunikasi internal menggunakan radio militer sangat membantu, tetapi koordinasi dengan pihak sipil terkadang mengalami hambatan karena perbedaan perangkat.
- 2. Apakah ada kendala dalam koordinasi antarlembaga atau tim relawan? Jika ya, apa penyebabnya?**
Ya, terkadang kendala muncul karena perbedaan prosedur kerja atau kurangnya data lapangan yang akurat.
- 3. Bagaimana informasi penting disampaikan kepada masyarakat terdampak?**
Informasi disampaikan melalui pengeras suara di posko dan oleh personel yang ditugaskan langsung ke lapangan.

D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. **Apa saja kebutuhan dasar yang sulit dipenuhi selama tanggap darurat?**
Air bersih, makanan siap saji, dan layanan kesehatan darurat sering kali menjadi tantangan utama.
2. **Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak?**
Distribusi dilakukan melalui posko utama dan titik evakuasi, tetapi sering terkendala oleh medan yang sulit dijangkau.
3. **Apakah ada kelompok tertentu yang sulit dijangkau? Jika ya, apa alasannya?**
Ya, warga di desa-desa terpencil sering sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana.

E. Logistik dan Sumber Daya

1. **Bagaimana pengelolaan logistik dilakukan selama tanggap darurat?**
Logistik dikelola oleh tim gabungan TNI, BPBD, dan relawan. Kami juga membantu pendistribusian menggunakan kendaraan militer.
2. **Apakah ada keterbatasan sumber daya (personel, peralatan, atau dana)? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?**
Ya, keterbatasan terjadi terutama pada alat berat dan logistik tambahan. Kami mengatasi hal ini dengan memobilisasi dukungan dari wilayah terdekat.
3. **Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik?**
Perencanaan lebih awal dan pembangunan gudang logistik di wilayah rawan bencana akan sangat membantu.

F. Dukungan Psikososial

1. **Apakah dukungan psikososial diberikan kepada masyarakat terdampak?**
Ya, kami bekerja sama dengan relawan dan tim medis untuk memberikan dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak dan lansia.
2. **Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan tersebut?**
Tanggapannya cukup positif. Banyak masyarakat merasa terbantu meskipun beberapa masih terlihat trauma berat.
3. **Apakah kendala dalam memberikan dukungan psikososial?**
Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi dan sulitnya menjangkau wilayah yang terdampak parah.

III. Pertanyaan Penutup

1. **Menurut Anda, apa yang dapat diperbaiki dalam sistem tanggap darurat bencana?**
Peningkatan koordinasi antar instansi, penyediaan alat berat yang memadai, dan perbaikan sistem peringatan dini sangat diperlukan.
2. **Apakah rekomendasi Anda untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan?**
Masyarakat harus lebih sadar akan risiko bencana dan rutin mengikuti pelatihan. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur jalan dan memperbanyak gudang logistik di daerah rawan.

Notulensi Wawancara dengan Unsur Pemerintah Desa

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2024
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Cigudeg
Peserta : Kaur Kesra Desa

Agenda: Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Tanggap Darurat Bencana

I. Pembukaan

1. Pewawancara memperkenalkan tujuan wawancara, yaitu menggali informasi terkait kesiapsiagaan, respons, dan kebutuhan dalam tanggap darurat bencana di desa.
 2. Perangkat desa menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya bersama untuk meningkatkan ketahanan desa terhadap bencana.
-

II. Hasil Diskusi

A. Kesiapsiagaan Sebelum Bencana

1. **Kegiatan yang Dilakukan:**
 - o Sosialisasi kepada warga melalui pertemuan desa dan posyandu.
 - o Pembentukan tim siaga bencana desa (TSBD) dengan bantuan pemerintah kabupaten.
 - o Inventarisasi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
2. **Pelatihan dan Simulasi:**
 - o Desa telah mengadakan simulasi tanggap darurat bekerja sama dengan BPBD, tetapi cakupannya masih terbatas.
 - o Pelatihan dianggap membantu, tetapi hanya sebagian kecil warga yang terlibat.
3. **Hambatan:**
 - o Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya kesiapsiagaan.
 - o Minimnya anggaran desa untuk kegiatan mitigasi dan pelatihan.

B. Respon Awal Saat Bencana Terjadi

1. **Penerimaan Informasi Awal:**
 - o Informasi bencana biasanya diterima dari warga yang melapor langsung atau melalui perangkat desa.
 - o Tidak ada alat peringatan dini khusus di desa.
2. **Kecepatan Informasi:**
 - o Informasi cukup cepat diterima oleh perangkat desa, tetapi penyampaian ke warga terutama di wilayah terpencil sering terlambat.
3. **Kendala Evakuasi:**
 - o Kendala utama adalah akses jalan yang terputus akibat longsor atau banjir.
 - o Kurangnya kendaraan evakuasi juga menjadi masalah serius.

C. Sistem Komunikasi dan Koordinasi

1. **Fungsi Sistem Komunikasi:**
 - o Komunikasi menggunakan grup WhatsApp perangkat desa cukup efektif untuk koordinasi internal.
 - o Namun, komunikasi dengan warga sering terhambat oleh sinyal yang buruk di beberapa dusun.
2. **Kendala Koordinasi:**
 - o Kurangnya pemahaman prosedur antarlembaga membuat koordinasi awal agak lambat.

- Pembagian tanggung jawab antara pihak desa, kecamatan, dan lembaga terkait perlu lebih jelas.
3. **Penyampaian Informasi ke Masyarakat:**
- Informasi disampaikan melalui pengeras suara masjid dan door-to-door oleh perangkat desa atau relawan.

D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. **Kebutuhan yang Sulit Dipenuhi:**
 - Air bersih, makanan siap saji, dan perlengkapan bayi sulit dipenuhi secara cepat.
 - Layanan kesehatan darurat juga sering terlambat hadir.
2. **Distribusi Bantuan:**
 - Bantuan biasanya datang melalui kecamatan atau BPBD, tetapi distribusinya terkadang lambat karena medan yang sulit.
3. **Kelompok Sulit Dijangkau:**
 - Warga yang tinggal di dusun terpencil atau daerah rawan longsor sulit dijangkau, terutama saat akses jalan tertutup.

E. Logistik dan Sumber Daya

1. **Pengelolaan Logistik:**
 - Logistik dikelola di posko desa dengan pengawasan ketat perangkat desa.
 - Distribusi dilakukan berdasarkan data warga terdampak yang diperbarui secara berkala.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:**
 - Keterbatasan alat berat, personel, dan anggaran menjadi tantangan utama dalam pengelolaan logistik.
 - Desa bergantung pada bantuan pihak luar, seperti BPBD dan relawan.
3. **Solusi:**
 - Memperbanyak pelatihan bagi perangkat desa tentang manajemen logistik dan meminta alokasi dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana.

F. Dukungan Psikososial

1. **Layanan Psikososial:**
 - Dukungan psikososial biasanya diberikan oleh relawan atau LSM, tetapi masih jarang dilakukan di desa.
2. **Tanggapan Masyarakat:**
 - Masyarakat merasa layanan ini bermanfaat, tetapi beberapa warga belum memahami pentingnya dukungan psikososial.
3. **Kendala:**
 - Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi dan terbatasnya waktu untuk menjangkau semua kelompok terdampak.

III. Rekomendasi

1. Memperkuat koordinasi antara desa, kecamatan, dan BPBD untuk memastikan sistem tanggap darurat yang lebih terstruktur.
2. Meningkatkan alokasi dana desa untuk kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
3. Mengadakan pelatihan rutin yang melibatkan lebih banyak warga, termasuk kelompok rentan.
4. Memperbaiki akses komunikasi, seperti pemasangan alat peringatan dini di titik-titik strategis.
5. Memperbanyak simulasi evakuasi di desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat